

## PENERAPAN PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH INDONESIA

Cristine Ayu<sup>1</sup>, Indah Wardhani<sup>2</sup>, Lasro Oktavia<sup>3</sup>, Nabila Lisna<sup>4</sup>

Fakultas MIPA (Fisika) Universitas Negeri Medan

EMAIL: ayusipayung01@gmail.com<sup>1</sup>, wardhani0709@gmail.com<sup>2</sup>,  
lasrooktaviasimatupang@gmail.com<sup>3</sup>, nabilalisna2005@gmail.com<sup>4</sup>.

## ABSTRAK

**Abstrak:** Penerapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki relevansi yang mendalam dalam kajian embang Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam berbagai peristiwa dan perkembangan embang bangsa. Melalui pendekatan historis dan analisis kritis, penelitian ini mengeksplorasi peran Pancasila dalam membentuk identitas nasional, mempersatukan berbagai etnis, serta sebagai panduan dalam menghadapi tantangan emban dan politik. Dengan mengkaji momen-momen kunci, seperti proklamasi kemerdekaan, orde baru, dan reformasi, jurnal ini menyoroti pentingnya Pancasila sebagai embanguna untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks embang tidak hanya memperkuat jati diri nasional, tetapi juga berfungsi sebagai landasan bagi embangunan emban dan politik yang berkelanjutan di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dinamika politik dan perbedaan ideologis di embanguna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pancasila tetap relevan dan krusial sebagai panduan dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan menjaga persatuan Indonesia, namun diperlukan emba konsisten dalam memperkuat pemahaman dan penerapannya di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata kunci:** Pancasila, embang Indonesia, identitas nasional, integrasi emban, embangunan.

**Abstract:** The application of Pancasila as the basis of the state of the Republic of Indonesia has deep relevance in the study of Indonesia's history. This journal aims to analyze how Pancasila values are integrated in various events and developments in the nation's history. Through a historical approach and critical analysis, this research explores the role of Pancasila in shaping national identity, uniting various ethnicities, and as a guide in facing social and political challenges. By examining key moments, such as the proclamation of independence, the new order, and reform, this journal highlights the importance of Pancasila as an instrument to maintain the integrity and unity of the nation. The findings show that the understanding and application of Pancasila values in the historical context not only strengthens national identity, but also serves as a foundation for sustainable social and political development in Indonesia. However, there are various challenges in its implementation, especially related to political dynamics and ideological differences in society. The conclusion of this study is that Pancasila remains relevant and crucial as a guide in facing national challenges and maintaining the unity of Indonesia, but consistent efforts are needed in strengthening its understanding and application in all lines of national and state life.

## Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

<b>Keywords:</b> Pancasila, Indonesia history, national identity, social integration, development	
---	--

## 1.PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan telah usang dikenal menjadi bagian pada nilai nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tadi dirumuskan menjadi dasar Negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali & dari berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup warga Indonesia. Sejak zaman dahulu, daerah-daerah pada nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh sang masyarakatnya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis), adalah penyebab lahirnya negara. Munculnya pertarungan yang mendera Indonesia, menerangkan sudah tergerusnya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Putri 2020).

Pancasila sebagai dasar negara baru disahkan oleh PPKI dalam tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi jauh sebelum di sahkan nilai-nilai pancasila telah terdapat dalam kehidupan rakyat Indonesia semenjak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia sebagai sebuah negara dimana nilai-nilai tadi berupa nilai-nilai tata cara istiadat, kebudayaan serta religius. Nilai-nilai yang terdapat lalu diambil dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu untuk memahami pancasila secara utuh dan kaitannya menggunakan jati diri bangsa Indonesia ini diperlukan pemahaman sejarah bangsa Indonesia pada membangun suatu negara dan dijadikannya pacasila menjadi dasar negara lantaran berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Hartianti 2017). Dalam pemaparan topik ini membahas beberapa hal penting yang Dimana dibagi atas beberapa bagian yang akan di tanya kan untuk hasil dari pembahasan mengenai topik:

### A.Sejarah Era Pra Kemerdekaan

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Radjiman inilah, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori Negara, yaitu: 1) Teori negara perseorangan (individualis), 2) Paham negara kelas dan 3) Paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yang terdiri dari: 1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (peri kemanusiaan), 3) Mufakat (demokrasi), 4) Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan) (Kaelan, 2000: 37-40).

Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut. Ir Soekarno mengatakan, "Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal- hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan. Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosofische grond-slag" daripada Indonesia Merdeka. Filosofische grond-slag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang

sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi" (Bahar, 1995: 63). Begitu hebatnya Ir. Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan, "Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala" (Soekarno dalam Latif, 2011: 21).

Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut: 1. Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2000: 29). 2. Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kesatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya (Suwarno, 1993: 20-21). 3. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojokusarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara. (Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, 2013)( Ina Magdalena, dkk,2019)

### **B. Sejarah Pasca Kemerdekaan di Indonesia**

Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu:

#### **1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949).**

Masa Tahun 1945-1949 sebagai masa berlakunya UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 menghendaki sistem pemerintahan presidensiil, tetapi dua bulan setelah kabinet presidensial pertama dibentuk, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Perubahan ini terjadi karena berbagai dorongan. Pertama, dalam rangka demokratisasi pemerintahan dan untuk memperoleh basis dukungan yang lebih luas.

Sesuai dengan Aturan Peralihan pasal IV hampir semua kekuasaan negara ada di tangan Presiden, sehingga nampak sebagai suatu kediktatoran dari pada demokrasi. Kedua, untuk meniadakan atau mengurangi pendapat sebagian orang, termasuk dunia internasional (Belanda) yang mempropagandakan, Indonesia merdeka adalah bentukan Jepang, dan dijalankan oleh para kolaborator Jepang yang semestinya di adili sebagai penjahat perang. Dengan perubahan sistem pemerintahan yang mengikutsertakan kekuatan yang tidak bekerjasama dengan Jepang, akan memudahkan usaha memperoleh dukungan internasional. Ketiga, sebagai jalan untuk menarik kelompok yang dipimpin Bung Syahrir, bersama-sama kelompok Soekarno-Hatta menghadapi kekuatan lain yang dipimpin oleh Tan Malaka. Secara lebih sederhana, perubahan

sistem pemerintahan pada dasarnya sebagai bagian dari konsolidasi Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai suatu praktek ketatanegaraan, sistem parlementer 1945-1949 menunjukkan beberapa keunikan. Pertama, perubahan sistem pemerintahan ini tanpa perubahan UUD. Jadi, semata-mata sebagai praktek ketatanegaraan. Praktek ini merupakan penyimpangan yang sangat mendasar dari sistem UUD 1945. Seandainya praktek tersebut ditolak, pasti akan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UUD 1945. Kedua, sistem parlementer tersebut tidak berjalan mulus.

Dalam berbagai keadaan, Presiden untuk sementara mengambil alih pemerintahan. Sesudah itu sistem parlementer dibentuk kembali, tetapi kemudian sistem parlementer ini di interupsi oleh pemerintahan presidensiil yang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta. (yang dikenal dengan sebutan pemerintahan presidensiil Hatta). Hal ini merupakan suatu keunikan, karena pemerintahan presidensiil tidak dipimpin Presiden (Soekarno) tetapi oleh Wakil Presiden (Hatta). Model ini dipandang sebagai suatu bentuk kedaruratan, karena itu tidak dapat dijadikan suatu varian baku dan tidak dapat dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan yang normal.

## 2. Pemerintahan parlementer (1949-1950)

Periode 1949-1950 sebagai masa RIS. Secara konstitusional RIS adalah negara dengan sistem pemerintahan parlementer Tetapi pemerintahan RIS yang pertama kali dibentuk tidak dijalankan berdasarkan sistem parlementer murni, karena parlemen tidak dapat memaksa Kabinet atau Menteri mengundurkan diri berdasarkan suatu mosi tidak percaya. Konstitusi RIS Pasal 122 menyebutkan: "Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut Pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya". Hingga pada saat RIS diubah atau kembali pada negara kesatuan, ketentuan di ataslah yang berlaku, sehingga belum dapat berkembang menuju sistem pemerintahan parlementer murni.

## 3. Pemerintahan (1950-1959) Periode 1950-1959,

Masa UUD 1950 yang menjalankan secara penuh sistem parlementer. Ada persamaan antara sistem parlementer 1945-1949 dengan masa 1950-1959. Keduanya menunjukkan pemerintahan yang tidak stabil, silih berganti dalam waktu yang pendek. Bagaimanapun kuatnya suatu susunan pemerintahan, dengan masa kerja yang terlalu pendek tidak akan memberi kesempatan untuk melaksanakan program-programnya secara wajar. Ketidak stabilan ini menjadi salah satu dasar yang mendorong memberlakukan kembali UUD 1945 (5 Juli Tahun 1959). Ketidak stabilan pemerintahan tersebut terjadi karena beberapa faktor: a) Sistem parlementer disertai sistem banyak partai. Di Parlemen (KNIP, DPRS dan DPR) tidak ada partai mayoritas-mutlak yang akan mendukung dan menjamin pemerintahan yang stabil. b) Akibat tidak partai yang mayoritas-mutlak, pemerintahan harus disusun berdasarkan koalisi. Bukan saja berbagai kompromi, tetapi koalisi setiap saat pecah akibat perbedaan pandangan antar partai pendukung pemerintah. c) Suasana yang sangat demokratis kadang-kadang dilaksanakan secara berlebihan. Bung Hatta menyebutnya sebagai "ultra demokrasi", tanpa memperhitungkan akibat pemerintahan yang tidak stabil bagi kehidupan masyarakat dan negara.

## 4. Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959 sampai dengan Orde Baru)

Periode 1959- sampai keruntuhan Orde Baru, 5 Juli 1959, UUD 1945 yang ditetapkan PPKI sebagai UUD sementara, dinyatakan berlaku kembali menggantikan UUDS Tahun 1950. Dari segi pemerintahan, selain memberikan kedudukan yang kuat kepada pemerintah, UUD 1945 lebih menjamin pemerintahan yang stabil. Ada berbagai alasan lain memberlakukan UUD 1945 seperti kembali kepada semangat proklamasi, tidak liberal. Berbagai kelemahan UUD 1945 antara lain kekuasaan eksekutif (Presiden) yang kuat (executive heavy) tanpa disertai sistem check and balances yang memadai.

Tanpa sistem kekuasaan pengimbang yang memadai, kekuasaan presiden yang besar menjadi kurang terkendali dan dapat menuju sistem kekuasaan otoritarian. Inilah yang dialami selama pemerintahan Presiden Soekarno (1959-1966) dan pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998). Kelemahan konstitusional ini diperkuat pula oleh budaya politik yang tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi seperti feodalisme dan pendekatan-pendekatan pengelolaan politik.

kharismatik-kosmis dalam Selanjutnya pasca Orde baru, yaitu berkaitan dengan Perubahan UUD I dan II, pola sistem pemerintahan yang ada dalam UUD 1945 juga belum memperlihatkan adanya suatu kejelasan sistem pemerintahan yang dianut, namun para wakil rakyat yang ada di MPR berupaya untuk menerapkan presidensial murni (Pemilihan Presiden secara langsung) dengan bentuk parlemen bicameral (dua kamar), tetapi hal ini perlu dilihat lebih lanjut kenyataan dalam pelaksanaannya.

#### 5. Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)

Reformasi politik di Indonesia telah menjadi tonggak sejarah yang mengubah wajah politik negara ini sejak tahun 1998. Kebijakan politik pada masa ini yang dianggap strategis dan hukum yang dilakukan pada era reformasi adalah:

- 1) Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, yang terdiri dari tokoh-tokoh sipil dan profesional<sup>1</sup>.
  - 2) Mengatasi masalah Dwifungsi ABRI, yaitu peran ganda ABRI sebagai alat pertahanan negara dan alat politik pemerintah. Pada tahun 1999, ABRI diubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dibebaskan dari keterlibatan politik praktis.
  - 3) Mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998, yang menghasilkan beberapa amandemen terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Amandemen ini antara lain menghapus Ketetapan MPR No. XI/MPR/1966 tentang Supersemar, menetapkan masa jabatan presiden maksimal dua periode lima tahun, dan menegaskan hak asasi manusia.
  - 4) Mencabut pembredelan pers, yang memberikan kebebasan bagi media massa untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa sensor atau tekanan dari pemerintah.
  - 5) Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Tahun 2002, sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di Indonesia.
- Masa Repormasi meskipun telah berlalu lebih dari dua dekade sejak gerakan reformasi dimulai, perjalanan ini belum mencapai puncaknya, dan tantangan serta peluang masih menjadi bagian integral dari proses menuju masa depan politik Indonesia yang lebih baik. (Leny, M, dkk. 2021.)

## 2.METODE PENELITIAN

**Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Pendekatan historis akan membantu memahami penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai periode sejarah Indonesia. Penelitian ini juga dapat memanfaatkan pendekatan interdisipliner. Selain menggunakan pendekatan historis, bisa juga melibatkan perspektif dari ilmu politik, sosiologi, dan hukum. Pendekatan interdisipliner dapat membantu memperkaya analisis terkait penerapan Pancasila dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia pada berbagai masa.

**Desain:** Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menggambarkan penerapan Pancasila serta interpretasi historis dari praktiknya dalam konteks sosial, politik, dan budaya.

**Teknik Pengumpulan Data:** Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan, di antaranya adalah **Wawancara**.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dimana narasumber yang diambil dari beberapa mahasiswa yang mengetahui beberapa konsep dasar mengenai Pancasila ,disini ada 5 pertanyaan mengenai topik utama yang dibahas ,antara lain :

1. Bagaimana pengalaman Anda terkait dengan penerapan Pancasila di lingkungan kampus?
2. Apakah Anda pernah terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong-royong atau persatuan dalam komunitas kampus?
3. Menurut Anda, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi?
4. Apa tantangan yang anda hadapi sebagai mahasiswa dalam memahami penerapan nilai nilai Pancasila pada sila pertama ?

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Penerapan Pancasila di Lingkungan Kampus**

Bagi seorang mahasiswa tentu kita harus menerapkan dan menjalankan Pancasila di kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan Pendidikan sebagai pedoman atau landasan hidup bernegara. Dalam lingkungan kampus tentu kita sebagai mahasiswa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang berkuliah di Universitas tersebut. Mereka pastinya berasal dari berbagai daerah dengan suku, ras, bahasa yang berbeda-beda begitupun dengan agama dan kepercayaannya. Sebagai mahasiswa yang cinta dengan Tanah Air nya, penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan kampus sangatlah penting dan merupakan suatu kewajiban untuk di laksanakan guna menjaga kerukunan antar sesama warga negara. (Web.kompasiana)

Menurut beberapa mahasiswa mengenai penerapan Pancasila di lingkungan kampus ialah :

-Menurut Luhut ; Mahasiswa seringkali menjadi garda depan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita harus aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, dan diskusi akademik. Namun, tantangan seperti perbedaan pendapat, tekanan akademik, dan pengaruh budaya luar dapat menghambat penerapan nilai-nilai tersebut. Di sisi lain, lingkungan kampus juga menawarkan banyak peluang untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan karakter yang berlandaskan Pancasila. (Luhut Pasaribu PSPF, 2024)

-Menurut Adelisa; Kampus merupakan tempat yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini. Kita sebagai mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang baik, seperti toleransi, gotong royong, dan rasa nasionalisme. Seperti yang Anda sebutkan, mahasiswa berasal dari berbagai latar belakang. Penerapan Pancasila membantu menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan inklusif, di mana perbedaan justru diperkaya. (Adelisa Sinaga)

### **B. Kegiatan Kampus Yang Berhubungan Dengan Nilai Pancasila**

#### **1. Ketuhanan yang maha esa**

Selalu percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada dan selalu pada mengawasi setiap tindakan kita di dalam kampus maupun diluar kampus.

Berikut contoh penerapan nilai-nilai sila ke-1 di lingkungan kampus:

Dalam kehidupan kampus, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dan dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

-Ikut dalam berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kampus.

#### **2. Kemanusiaan yang adil dan beradab**

Dalam penerapannya, sila ini menjamin setiap warga negara atas kewajiban dan hak yang sama

Berikut contoh penerapan nilai-nilai sila ke-2 di lingkungan kampus:

-Hindari perilaku bullying karena itu bentuk ketidakadilan

-Ikut aktif dalam kegiatan kemanusiaan.

-Tidak melakukan diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, budaya

#### **3. Persatuan Indonesia**

Persatuan dan kesatuan menjadi modal utama suatu bangsa untuk menciptakan kemajuan dan bangsa yang besar dan juga dapat mengalami kemunduran dan jika tidak memiliki persatuan yang kuat dan masyarakat tidak memiliki jiwa nasionalisme.

Berikut contoh penerapan nilai-nilai sila ke-3 dalam lingkungan kampus:

-Meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif untuk menjaga persatuan seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong.

-Melalui organisasi kemahasiswaan membentuk jaringan asosiasi berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

#### **4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan**

Bahwasannya setiap individu dalam perguruan tinggi menginginkan suatu sistem yang itu sifatnya musyawarah. Karena dalam musyawarah, kita mencari solusi yang terbaik, juga butuh

wakil dari berbagai pihak agar kita bisa menyatukan pendapat dan mendapatkan solusi yang terbaik.

Berikut contoh penerapan nilai-nilai sila ke-4 dalam lingkungan kampus:

-Diskusi kelas

-Rapat ukm

-Musyawarah pemilihan BEM

-Musyawarah pemilihan ketua senat

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Tindakan nyata yang dapat kita lakukan di lingkungan kampus sebagai pembudayaan sila kelima sila pancasila adalah penyediaan fasilitas yang sama untuk semua mahasiswa tanpa harus saling bersinggungan.

Berikut contoh penerapan nilai-nilai sila ke-5 dalam lingkungan kampus:

-Memberi mahasiswa izin akses yang sama untuk meminjam buku dari perpustakaan

-Kakak tingkat memberi kesempatan adik tingkat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampus.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian akhir semester. Menyiapkan Generasi Penerus: Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, mereka akan menjadi generasi penerus yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menghindari Konflik: Penerapan Pancasila dapat mencegah terjadinya konflik horizontal yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar kelompok. (web.Kompas)

Ada beberapa pendapat dari mahasiswa mengenai kegiatan yang berhubungan dengan nilai Pancasila :

-Menurut Rafi ; jadi menurut saya Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus sangat penting untuk membentuk karakter menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Berikut beberapa contoh penerapan Pancasila di lingkungan kampus:

Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Kegiatan keagamaan bersama antar umat beragama.

Sila Kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab): Pelaksanaan kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, atau kunjungan ke panti asuhan.

Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat lintas organisasi.

Sila Keempat (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Proses pengambilan keputusan dalam organisasi kemahasiswaan melalui musyawarah mufakat.

Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Pemberian kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa untuk mengembangkan diri. (Rafi PSKM 2023)

-Menurut Zahra ; menurut saya, kegiatan di kampus yang berhubungan dengan pancasila yaitu organisasi, contohnya organisasi kemahasiswaan yaitu osis, karena disana kita diajarkan tentang pancasila. Dalam organisasi, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori Pancasila, tetapi juga langsung mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam rapat-rapat organisasi, nilai musyawarah untuk mencapai mufakat (sila ke-4) diterapkan secara nyata. (Zahra PJKR 2023)

-Menurut Andre menurut saya di lingkungan kampus, penerapan Pancasila sering terlihat melalui kegiatan seperti gotong royong, di mana mahasiswa bersama-sama membersihkan area kampus atau membantu masyarakat sekitar. Kegiatan seminar atau diskusi tentang toleransi dan keberagaman juga mencerminkan nilai persatuan. Kegiatan-kegiatan ini penting untuk memperkuat solidaritas dan menciptakan lingkungan yang inklusif di kampus. (Andre PSH 2022)

### **C. Tantangan yang Dihadapi Mahasiswa Dalam Penerapan Nilai Pancasila**

Beberapa tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam penerapan sila pertama Pancasila, yaitu:

- Munculnya kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang mengancam keharmonisan antarumat beragama
- Pergeseran nilai keagamaan
- Lemahnya pendidikan karakter
- Radikalisme, yaitu mengikuti hal-hal yang tertulis di dalam kitab suci secara mentah-mentah
- Fanatisme, yaitu cara pandang orang yang melihat agamanya paling benar sendiri dan menjelek-jelekan agama lain .

Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu: Berdoa dan bersyukur setiap hari, Toleransi beragama, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, Membantu sesama dalam kesulitan, Menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. (Binus UNIVERSITY)

Ada beberapa pendapat mahasiswa mengenai tantangan yang dihadapi Ketika menerapkan nilai nilai Pancasila pada sila yang pertama :

-Menurut Ahmad ; menurut saya, tantangan nya misalnya saat diskusi tentang agama, kadang muncul perbedaan pendapat yang cukup tajam. ini bisa memicu perdebatan yang kurang sehat. yang kedua toleransi, menjaga toleransi antar umat beragama dilingkungan kampus yang beragam itu nggak selalu mudah. yang ketiga itu sekularisme trend sekularisme yang semakin kuat bisa membuat sebaiknya siswa kurang tertarik dengan hal-hal yang berbau agama.(Ahmad PSM 2022)

-Menurut Khaterin; tantangan yang saya hadapi sebagai mahasiswa dalam memahami penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama Interpretasi yang Beragam:

Pluralisme agama: Indonesia memiliki keberagaman agama yang sangat tinggi. Ini bisa memunculkan berbagai interpretasi terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga mahasiswa kadang kesulitan menemukan titik temu.

Tentu, saya melihat adanya ketidaksesuaian antara penerapan Pancasila dalam kebijakan pemerintah atau kampus dengan praktik di lapangan. faktor yang menyebabkan hal ini adalah interpretasi yang berbeda.(Khaterin PSPF 21)

-Menurut Ruben ; Sebagai mahasiswa, tantangan dalam memahami penerapan sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) meliputi keberagaman agama di antara teman sekelas, berbagai interpretasi makna Ketuhanan, dan krisis identitas akibat pengaruh globalisasi. Selain itu, sulitnya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam lingkungan kampus yang cenderung sekuler juga menjadi hambatan. Menghadapi tantangan ini memerlukan dialog dan pendidikan yang terus menerus untuk membangun pemahaman yang lebih baik.(Ruben PSF 2022 )

#### **D.Nilai Pancasila Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Modernisasi**

Globalisasi merupakan proses menduniannya suatu hal sehingga batas negara akan hilang. Sedangkan modernisasi merupakan proses perubahan dari yang belum maju ke yang lebih maju. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi di era saat ini. Dimana globalisasi yang didorong oleh kemajuan IPTEK dan seluruh aspek yang lebih maju di suatu negara serta dapat menghilangkan batas negara satu dengan lainnya. Maka dari itu setiap negara diperlukan suatu dasar negara agar terdapat batasan diantara negara tersebut.(Perbawa 2022)

Ada beberapa pendapat mengenai nilai Pancasila mengenai tantangan globalisasi dan modernisasi :

-Menurut Febia ; menurut saya nilai Pancasila masih relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi alasannya Filsafat yang Mendasar: Pancasila dibangun di atas filsafat yang mendasar tentang kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai ini bersifat universal dan tidak lekang oleh zaman. Fleksibel dan Adaptif: Pancasila bersifat dinamis dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai konteks zaman. Artinya, nilai-nilai Pancasila dapat terus relevan meskipun dunia terus berubah. Solusi atas Masalah Global: Banyak tantangan global seperti ketidaksetaraan, konflik, dan kerusakan lingkungan yang dapat diatasi dengan

menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, nilai gotong royong dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

-Menurut Dimas; menurut saya, Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Pancasila mendorong keadilan sosial, yang penting untuk mengatasi kesenjangan yang mungkin timbul akibat globalisasi. Selain itu, nilai persatuan membantu menjaga harmoni di tengah keragaman budaya dan agama. Gotong royong memperkuat solidaritas di masyarakat, sedangkan kedaulatan bangsa memastikan bahwa keputusan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman penting untuk mempertahankan identitas dan karakter bangsa di era modern. (Dimas PSB 2021)

## 1. KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat dan kompleks. Kajian sejarah menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa untuk menemukan ideologi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang telah hidup dan berkembang di bumi Indonesia.

Sepanjang sejarah, Pancasila telah mengalami dinamika yang cukup signifikan. Terdapat upaya untuk mengidentikkan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, hingga melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila terus dikaji dan dikembangkan agar sesuai dengan tantangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]Ario,K.dkk.(2020).Dinamika Pancasila dalam sejarahnya bangsa indonesia sampai kondisi saat ini. Jurnal Pancasila.jakarta barat.
- [2]Sartika,M.dkk.(2021).PENERAPAN NILAI PANCASILA DARI ARUS SEJARAH PERJUANGAN DAN DAMPAK GLOBALISASI.Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.Vol. 9 No. 2
- [3]Syamsudin,M.dkk(2009).pendidikan pancasila.UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
- [4]<https://www.kompasiana.com/tafsyir15170/63c3e8404addee7b110b0175/penerapan-nilai-nilai-pancasila-di-lingkungan-kampus>
- [5]Leny, M, dkk. 2021.buku ajar pancasila dan kewarganegaraan. sopedia com: Jakarta
- [6]Ina,M dkk.2019.ragam tulisan tentang Pancasila.cv jejak,anggota IKAPI :Jawa Barat

